ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dirga Agung¹, Andi Dewi Pratiwi², Lidwina Aprilliana A.T³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.

²Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat

Email: dirgagunk88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan penegakan Hukum terhadap perjudian online, tentang Undang-undang yang mengatur dan sanksi yang diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif dimana menggunakan data sekunder yakni tinjauan Pustaka dan aturan Perundang-undangan yang mengatur terkait perjudian online. Dalam menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif antara lain, teori-teori penegakan hukum terhadap perjudian, faktor yang mendorong terjadinya judi online, dampak yang diakibatkan, dan tanggung jawabnya terhadap pelanggaran norma hukum yang dapat mengganggu dan merugikan bagi pelaku bahkan Sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk masalah finansial, mengganggu produktifitas dalam pekerjaan dan bisnis, Menghambat kemajuan karier serta merusak Kesehatan mental dan emosional. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah Pembentukan satuan tugas terpadu lintas kementerian untuk memberantas judi online, edukasi dan sosialisasi, pemblokiran situs web yang dapat mengakses judi online, pencegahan dan rehabilitasi bagi tealh terlanjur menjadi korban perjudian online.

Kata Kunci: Judi Online, media sosial, tindak pidana ITE

Abstract

This research was conducted with the aim of describing law enforcement against online gambling, regarding the laws governing and sanctions received. The research method used is the Normative Legal research method. where secondary data is used, namely a literature review and statutory regulations governing online gambling. In analyzing legal norms using a normative juridical approach among others : theories of law enforcement against gambling, factors that encourage online gambling, the impact caused and its responsibility for violations of legal norms that can be disruptive and detrimental to the perpetrators and even the majority of Indonesian society, including financial problems, disrupting productivity in work and business, Hinders career advancement and damages mental and emotional health. The steps taken by the government are the formation of an integrated cross-ministerial task force to eradicate online gambling, education and socialization, blocking websites that can access online gambling, prevention and rehabilitation for those who have become victims of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Social Media, ITE crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini memiliki dampak yang besar bagi Masyarakat. Tidak hanya memiliki positif tetapi memiliki dampak negatif, bahkan menjadi alat untuk melakukan tindak kejahatan bagi Masyarakat di sekitarnya. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang semakin canggih

semakin bertambah pula ide-ide yang dapat membayakan bagi Masyarakat lainnya. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah internet yang dapat dipergunakan secara bebas dan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat banyak dampak positif yang diberikan namun banyak juga oknum-oknum yang menyalagunakan media internet tersebut. Salah satunya adalah digunakan sebagai media judi online yang dapat mempengaruhi masyarakat disemua kalangan dan dengan cepat merambat disemua kalangan masyarakat. Sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan karena secara terang terangan permainan judi online yang berbagai macam jenisnya seperti wala meron, zeus dan berbagai macam game lainnya yang menggunakan investasi kedalam saldo rekening bank atau dana yang kemudian terkoneksi secara otomatis dengan situs game perjudian tersebut sehingga transaksi mengalir deras anantara pihak yang mengadakan situs perjudian dengan para pemain yang tidak lain adalah Masyarakat itu sendiri dari berbagai golongan dan usia.

Permainan atau game seperti ini tanpa ada rasa bersalah dilakukan oleh Masyarakat di berbagai tempat bahkan di tempat dan fasilitas umumpun tidak luput dari permainan tersebut, ada pula perjudian online yang dilakukan oleh Masyarakat dengan cara menjalankan panggilan telepon video melalui aplikasi whatsapp sambil mnonton pertarungan sabung ayam di tempat salah satu pihak yang mengadakan panggilan telepon dimana pertaruhan/ judi sabung ayam tersebut diadakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab padahal sudah nyata diketahui bahwa perbuatan tersebut menyimpang dari peraturan yang berlaku secara umum, dan secara spesifiknya pada **Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana metode yang dapat ditempuh oleh pemerintah/institusi terkait untuk menanggulangi tindak pidana judi online tersebut?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana judi online yang terjaring dalam rasia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian diusahakan mencari sebuah Solusi dan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala permasalahan hukum tersebut (Effendi, 2022). Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu adalah pertama Ilmu hukum tentang kaidah- kaidah hukum, kedua Ilmu Hukum tentang pengertian Pokok dalam hukum, ketiga Ilmu hukum tentang kenyataan hukum yang mencakup beberapa cabang ilmu hukum (Asikin, 2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi kekaburan, kekosongan, dan konflik norma (Diantha, 2016). Dimana dengan metode ini diperlukan adanya sumber hukum, seperti peraturan-peraturan dan Keputusan Undang-undang (Sembiring, 2008). Menurut Rowe penelitian Normatif Bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis dan mengemukakan, secara sistematis fakta, prinsip-prinsip, konsep, teori, Undang-Undang tertentu sehingga menemukan ilmu pengetahuan dan ide-ide baru untuk dijadikan sebuah masukan dan disarankan menjadi suatu perubahan atau pembaruan (Hatta, 2022). Metode penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan (Syahrudin, 2022). Dalam hal ini metode penelitian normatif dilakukan dengan cara menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun teknik yang digunakan yaitu dengan tinjauan pustaka dengan cara mengutip dan meringkas data dan informasi dari peraturan atau literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini (Jainah, 2023). Untuk menganalisis data dilakukan dengan pendekatan logika untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Terdapat dua jenis penyimpulan logika, yaitu penyimpulan induktif dan deduktif (Purbaya, 2024). Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik Kesimpulan dengan pemikiran induktif yakni berangkat dari permasalahan umum ke menuju ke khusus atau permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Hukum Berdasarkan Para Ahli

Orientasi Hukum mempunyai fungsi sebagai alat, sarana (*tool*) dalam menata tujuan-tujuan hidup kemanusiaan dalam berbagai aspeknya, antara lain bermasyarakat, berpemerintahan, bernegara, berinteraksi, dengan sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Salle, 2020). Nurdiansyah Dkk menjelaskan tentang teori hukum berdasarkan para ahli adalah sebagai berikut (Nurdiansyah et al, 2024):

1. Teori Regulasi dan Kepatuhan Hukum

Kraakman et al dalam karya mereka yang berjudul "*The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*" menekankan akan sangat pentingnya regulasi yang komprehensif dalam memastikan kepatuhan. Mereka menunjukkan bahwa peraturan yang tepat merupakan salah satu langkah pencegahan yang efektif terhadap kejahatan ekonomi. Buku "*Dealing with Online Gambling: Global Approaches*" karya Calvin Ayre menyatakan bahwa adanya regulasi global yang jelas dalam perjudian online sangat berperan penting sebagai salah satu alat pencegah dan juga mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas

Teori Penegakan Hukum membahas sejauh mana tindakan penegakan hukum dapat dianggap efektif, serta peran berbagai faktor seperti teknologi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga dalam upaya meningkatkan efektivitas tersebut. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, dibutuhkan dukungan dari teknologi yang memadai serta adanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Harris dalam "*Policing and the Internet: An Empirical Study of E-Crime*" menyebutkan bahwa untuk berhasilnya sebuah penegakan hukum dalam sebuah kejahatan online juga memerlukan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, kerja sama dan kolaborasi antar lembaga yang terkait untuk mendeteksi dan kemudian diadakan penindakan terhadap pelaku kejahatan online.

3. Teori Kerjasama Internasional

Teori Kerjasama Internasional menggarisbawahi pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Upaya ini meliputi pertukaran informasi,

penandatanganan perjanjian ekstradisi, serta penetapan standar internasional untuk regulasi. Dengan kerjasama yang solid, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

Stessens dalam karyanya yang berjudul "*International Cooperation in Criminal Matters*" membahas kontribusi perjanjian internasional dan kerjasama antar negara terhadap penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas batas, termasuk judi online.

Interpol mengeluarkan laporan yang menyoroti pentingnya kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan online, yang menunjukkan bahwa koordinasi antar negara dapat memperkuat upaya penegakan hukum.

4. Teori Teknologi dalam Penegakan Hukum

Teori Teknologi berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, meliputi alat-alat seperti forensik digital, analisis data dan blockchain. Dengan adanya teknologi, efisiensi penegakan hukum dapat meningkat, serta pelacakan pelaku kejahatan menjadi lebih mudah.

Dalam karyanya yang berjudul "*Digital Forensics and Technology in Crime Investigation*," Miller dan McGloin menjelaskan bagaimana teknologi forensik dan analisis data mampu meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam mendeteksi kejahatan online. Sementara itu, Goodman dan Andrew (2017) membahas penerapan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, yang sangat relevan dalam konteks perjudian online.

5. Teori Pencegahan dan Edukasi

Teori Pencegahan dan Edukasi menggarisbawahi pentingnya pendidikan serta upaya pencegahan dalam mengurangi angka kejahatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi online dan langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pelanggaran dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam penegakan hukum. Dalam karyanya, Griffiths mengungkapkan bahwa pendidikan dan kampanye pencegahan memiliki potensi besar dalam menurunkan prevalensi masalah perjudian. Harrigan dan Dixon juga mengeksplorasi strategi pencegahan perjudian yang efektif dan bagaimana kampanye edukasi dapat berperan dalam menanggulangi judi online yang ilegal.

6. Teori Pengadilan dan Sistem Peradilan

Teori Pengadilan meneliti bagaimana sistem peradilan yang efisien dan transparan dapat memengaruhi hasil dari penegakan hukum. Pengadilan yang fokus pada kasus judi online berpotensi meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses hukum. Harris, dalam tulisannya tentang "Peran Pengadilan Khusus dalam Peradilan Pidana," membahas bagaimana pengadilan yang ditujukan khusus dapat mempercepat penyelesaian kasus serta meningkatkan kinerja sistem peradilan secara keseluruhan. Selain itu, Kleinig menekankan pentingnya penerapan teknologi dan pelatihan dalam pengadilan untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti judi online.

7. Teori Dukungan Masyarakat

Teori Dukungan Masyarakat mengkaji bagaimana peran serta masyarakat untuk terlibat didalam proses penegakan hukum untuk memperkuat penegakan hukum. Inisiatif dukungan masyarakat, kampanye kesadaran, Pendidikan dan partisipasi aktif, berkontribusi dalam identifikasi dan penindakan terhadap kejahatan. Tyler , dalam bukunya "Mengapa Orang Mematuhi Hukum," menjelaskan bahwa dukungan masyarakat serta persepsi keadilan dapat memengaruhi kepatuhan individu terhadap hukum dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Klerks & Taylor membahas bagaimana program pemberdayaan masyarakat untuk terlibat didalam mendukung upaya penegakan hukum melalui partisipasi aktif dan pelaporan.

Regulasi hukum yang jelas dan komprehensif, ditunjang dengan teknologi dan kerjasama internasional yang baik, akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Pendidikan dan pencegahan masyarakat yang efektif, serta sistem peradilan yang efisien, akan memperkuat upaya penegakan hukum dan mengurangi prevalensi tindak pidana judi online (Nurdianysah et al, 2024).

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Game

Game ini diciptakan dan dirancang untuk dijadikan hiburan, menghilangkan penat dan mengisi waktu luang. Keberuntungan didalam sebuah permainan atau yang lasim disebut game

pastinya sipemain tidak akan selalu menang dan mendatangkan sebuah keberuntungan untuk diri sendiri tetapi selalu ada risiko berupa kekalahan yang harus ditanggung oleh sipemain. taruhan yang dipasang saat memainkan sebuah permainan, jika seseorang pemain memasang taruhan dalam bentuk uang yang digunakan untuk memainkan sebuah permainan dan dengan satu tujuan yaitu untuk mendapatkan kemenangan atas uang yang dipertaruhkan tersebut maka dapat dikatakan bahwa permainan atau game tersebut sebagai permainan peluang untuk mendapatkan kemenangan lagi.

Game online

Game online adalah permainan yang dimainkan oleh siapa pun, kapan pun dan dimana saja dengan menggunakan prasarana jaringan internet dan yang semacamnya serta selalu memakai teknologi yang ada sekarang ini, seperti modem, koneksi kabel prasarana lainnya. game online ini jika diartikan kedalam bahasa Indonesia ialah permainan yang dimainkan secara daring.

Biasanya permainan secara daring ini disediakan sebagai ekstra layanan dari perusahaan penyedia jasa online, dan dapat diakses langsung dari hp, computer dan sarana lainnya melalui sistem yang disediakan oleh perusahaan yang meluangkan permainan tersebut.

Setiap game online dapat dimainkan oleh beberapa orang atau pengguna secara bersamaan dengan menggunakan hp, tab ataupun computer yang terhubung ke dalam suatu jaringan tertentu. (ruang pengetahuan)

Judi online

Judi online ialah segala bentuk perjudian yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya yang tersambung ke internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya dalam memainkan berbagai jenis permainan seperti wala meron, poker, blackjack, roulette, dan mesin slot secara virtual. Berbeda dengan judi konvensional yang biasanya dilakukan di pesta rambu solo' dan Ketika sudah tidak ada pesta maka para penghobi judi mencari tempat di Semak- Semak atau bahkan di hutan yang jauh dari keramaian dan fasilitas umum untuk menghindari kejaran Polisi sekalian untuk memudahkan pelarian apabila terlanjur di kejar Polisi, (sedikit contoh penulis ambil dari kejadian yang relevan di kampung penulis). judi

online ini memungkinkan pemain untuk berjudi kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan hp dan perangkat lainnya selama terhubung dengan internet.

Wala Meron (Salah satu bentuk judi Online)

Pengertian dari istilah wala meron pada judi sabung ayam online adalah istilah yang berasal dari tradisi sabung ayam di Filipina. Istilah ini digunakan untuk menentukan pemenang dalam pertarungan antara dua ekor ayam jago yang dipertandingkan secara online.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penegakan Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Upaya meningaktakan penegakan hukum anatara lain : Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak Hukum, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan system rekrutmen dan promosi aparat penegak Hukum, mengupayakan peninngkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup (Abqa, 2024).

Dampak judi online adalah pertama, secara finansial, dimana judi online dapat menyebabkan masalah serius dalam pengelolaan keuangan seseorang. Dampak sosial yang terlihat, seperti isolasi dan konflik dalam keluarga, mengindikasikan bahwa judi online tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan mereka dengan orang lain (Sriyana, 2025). Kehilangan uang secara terus menerus dalam kegiatan judi online dapat mengakibatkan hutang yang menumpuk, kesulitan dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan kerugian yang menghancurkan secara finansial. Kedua, dapat mempengaruhi produktifitas dalam pekerjaan dan bisnis. Menghambat kemajuan karier dan menyebabkan kerugian dalam investasi yang direncanakan. Kemudian dampak lain adalah ke aspek Kesehatan mental dan emosional. Ketergantungan pada judi online dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan kecemasan dan Depresi. Dampak negatif lainnya adalah terganggunya hubungan sosial dan interpersonal. Keterlibatan yang berlebihan dalam judi online dapat mengisolasi individu dari keluarga, teman, dan komunitas mereka, bahkan aktifitas sosial yang biasanya dilakukan Bersama orang-orang terdekat

menjadi terabaikan sementara waktu dan energi di habiskan untuk berjudi. Hal ini dapat merusak dan memicu konflik interpersonal yang serius (Azis, 2024).

Perjudian di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa Tahun terakhir, menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis. Meskipun dengan hukum yang ketat dan pandangan sosial yang kritis. Perjudian online di Indonesia terus menarik minat pemain dan investasi dari dalam Negeri dan luar Negeri. Perjudian di Indonesia memiliki Sejarah yang Panjang. Regulasi perjudian telah mengalami perubahan signifikan. Hukum yang ketat tentang perjudian masih berlaku, tetapi implementasinya bervariasi di berbagai provinsi. Pada Tahun 2014 pemerintah Indonesia meluncurkan program "*internet Positif*" untuk memblokir situs web perjudian online.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP disebutkan: "Suatu perbuatan hanya dapat menjadi suatu tindak pidana apabila didasarkan pada berlakunya peraturan pidana yang berlaku. Terkenal dengan asas "*Nulum deliictum nullaa poena sine praevia lege poenali*". Oleh karena itu, permainan tradisional tidak dapat memasukkan unsur-unsur yang ada pada permainan online, dalam aturan hukumnya, segala bentuk kejahatan yang medianya dilakukan secara online merupakan bagian dari pada *Cyber Crime*, tentunya peraturan terhadap hal tersebut harus secara khusus disusun dan diberlakukan. (D Pardede, 2019). *Cyber Crime* adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (*Cyber Space*), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi (Yurizal, 2018).

Berdasarkan pasal 303 dan pasal 303 bis dalam KUHP tentang larangan terhadap bentuk perjudian Jika terdapat seseorang yang kedapatan melakukan Tindakan yang dalam hal ini mengandung unsur judi, memberikan peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana judi, dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian bagi dirinya maka orang tersebut akan di berikan sanksi . (Prof. Moeljatno, S.H.) sesuai aturan yang berlaku yakni UU ITE dan KUHP, sanksi tersebut berupa pemidanaan serta sanksi terhadap pembayaran denda yang besarnya ditentukan oleh pengadilan setempat yang menangani perkara tersebut salah satunya adalah judi Online dengan ancaman pidana penjara dan denda, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas melarang penyebaran informasi serta akses ke konten perjudian online. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, disebutkan bahwa penyebaran informasi terkait perjudian daring

dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pelarangan perjudian juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang melarang semua bentuk perjudian di Indonesia. Tak kalah penting, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk kegiatan judi online. Mereka yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana, denda, atau pemblokiran akses ke platform perjudian tersebut (Juhara et al, 2025).

Perjudian adalah tindakan yang jelas melanggar hukum dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun remaja. Aktivitas ini tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga menyalahi norma, tata krama, serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Saat ini, perjudian online semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK). Terdapat berbagai bentuk perjudian online yang dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang merasa bahwa situs judi merupakan alternatif untuk meraih keuntungan, meskipun hal ini bertentangan dengan regulasi yang ada. Siapa pun dapat mengakses permainan judi secara online melalui berbagai situs yang tersedia tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat (Sitanggung et al, 2023).

Kemudian mengenai judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian." Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pemberian izin terhadap perjudian merupakan sebuah pelanggaran (Nurdiansyah et al, 2024).

Pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada adanya kesalahan, baik yang bersifat kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Konsep pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikis yang memicu penerapan ketentuan pidana, baik dari perspektif umum maupun pribadi. Setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana (Bakhtiar dan Adilah, 2024). Sanksi pidana adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penerapan

hukuman pidana. Pemberian sanksi ini hanya dapat dilakukan jika seseorang terbukti bersalah karena melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki konteks yang saling terkait. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan, menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat (Arief, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah Bersama institusi terkait untuk membasmi judi online Pemerintah dalam Upaya membasmi judi online telah melakukan beberapa Langkah seperti

1. Pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu lintas kementerian untuk memberantas judi online
2. Edukasi dan sosialisasi, pemerintah telah melakukan kampanye public untuk memberikan informasi tentang dampak negative judi online dan cara melaporkannya.
3. Pemblokiran konten oleh kementerian komunikasi dan informatika dalam hal ini kominfo aktif dalam memblokir situs web, Alamat ip, aplikasi dan konten media sosial yang terkait dengan perjudian online. Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia platform digital dan operator seluler untuk menelusuri dan memutus akses konten judi online.
4. Pemblokiran rekening oleh otoritas jasa keuangan (ojk) juga turut berpartisipasi dalam pemberantasan judi online dengan cara memblokir rekening bank dan dompet elektronik yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online
5. Pemantauan transaksi keuangan dalam hal ini pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan terkait judi online
6. Penguatan regulasi pemerintah juga telah berupaya memperkuat regulasi dan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menerapkan teknologi blokir berlapis yang terus dimutakhirkan

7. Pencegahan dan rehabilitasi, pemerintah sudah menggunakan berbagai macam cara dalam Upaya pemberantasan judi online, dan bagi Masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban dari judi online tetap juga disiapkan tempat rehabilitasi untuk mereka

Dari beberapa Upaya diatas yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membasmi judi online tidak selamanya berjalan mulus sesuai rencana dibuktikan dengan pemerintah masih selalu kebobolan dan situs serta iklan judi online masih banyak muncul di berbagai macam media sosial dan hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah dalam perjalanan Upaya pemberantasan judi online penyedia situs dan layanan judi online menggunakan berbagai jenis cara dengan kepintaran mereka menggunakan media computer dan prasarana internet sebagai alat untuk melancarkan aksinya, mereka bekerja secara kolektif dengan menyediakan sarana dan prasarana, system pembayaran, deposit, dan withdraw. Mereka juga mengirimkan alat pembayaran rekening bank di Indonesia melalui ekspedisi keluar negeri dengan menyamarkan transaksi keuangan. Dalam Upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pemblokiran juga mengalami tantangan operator judi online juga ternyata menggunakan teknologi yang kompleks seperti penggunaan vpn untuk menghindari pemblokiran sehingga situs judi online itu terus berkembang dan menyulitkan Tindakan pemerintah dalam upaya pemberantasan,

Sosial budaya juga turut ambil andil didalamnya karena masih ada budaya yang mentoleran terhadap praktik judi seperti di tana toraja yang masih mentoleran judi offline seperti sabung ayam, Sabung ayam dapat dianggap sebagai judi apabila memenuhi beberapa unsur berikut: yaitu, jika pertandingan sabung ayam dilangsungkan lebih dari satu sesi melibatkan taruhan, dan tanpa mengharapkan persetujuan dari pejabat atau pemerintah yang berwenang (Novianti et al, 2016). adu kerbau dll yang selalu diadakan pada pesta adat rambu solo' yang kadang masih mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk dilaksanakan karena dikaitkan dengan budaya meskipun budaya yang sebenarnya tidak seperti itu jadi disini seakan akan judi dibungkus dengan budaya. Setelah mendapatkan izin pelaksanaan dengan waktu yang terbatas (1 atau 2 hari) dalam pelaksanaannya sabung ayam, adu kerbau, dll. Di videokan oleh Masyarakat yang kemudian dibagikan kedalam group media sosial video sabung ayam dan adu kerbau yang entah apa tujuan mereka melakukan hal tersebut, apakah untuk

gaya-gayaan atau mau dianggap hebat karena bermain judi tanpa mereka sadari tersebut dimana perbuatan tersebut sudah melanggar UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 mengenai Perbuatan yang dilarang. Selain itu si pengedar video juga tanpa menyadari dampak yang akan ditimbulkan terhadap generasi di masa mendatang, tak hanya itu ada pula Masyarakat yang sudah berhenti bermain judi tapi karena Kembali menonton video yang dibagikan di media sosial tersebut Kembali membangkitkan penyakit lamanya yang sudah di tinggalkan sehingga bertambah lagi pencinta judi, termasuk judi online jika masa izin judi offline sudah habis Masyarakat akan Kembali lagi mencari situs judi online seperti sabung ayam online yang dikenal dengan sebutan wala meron dan berbagai macam jenis judi online lainnya yang dengan mudahnya Kembali ditemukan dalam media sosial. Perjudian telah menjadi masalah sosial yang sudah ada sejak manusia lahir, dan hingga saat ini, fenomena ini tetap berlanjut untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sayangnya, praktik perjudian sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan di masyarakat (Pamungkas, 2024).

Di sisi lain upaya pemerintah juga sudah berupaya mendorong Masyarakat untuk melaporkan aktivitas judi online dengan berbagai macam cara seperti Kanal pelaporan yang mudah diakses, dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan berbagai kanal bagi Masyarakat untuk melaporkan konten judi online seperti email ke <https://pse.kominfo.go.id> disiapkan juga laporan konten judi online melalui laman aduankonten.id sementara kominfo juga menyiapkan chatbot untuk melayani laporan Masyarakat terkait konten perjudian online secara cepat dan mudah jadi Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini sangat membutuhkan kerja sama, peran dan dukungan dari Masyarakat untuk melaporkan aktivitas judi online ini untuk memastikan pemberantasan judi online dapat dilakukan oleh pemerintah secara efektif dan menyentuh akar permasalahan tersebut akan tetapi sangat disayangkan karena untuk sampai saat ini masih sangat banyak konten judi online yang muncul setiap kita membuka media sosial berarti dapat kita Tarik Kesimpulan bahwa sangat minim partisipasi Masyarakat dalam melaporkan judi online tersebut kepada pemerintah padahal sudah disiapkan prasarana.

Saran

Dalam mengikuti perkembangan zaman yang dari hari ke hari makin canggih terutama dibidang teknologi maka sebaiknya kita lebih bertanggung jawab didalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada, data yang berada di tangan kita harus di Kelola dengan sebaik mungkin sebelum mempublikasikannya sebaiknya terlebih dahulu di Analisa apakah data tersebut setelah di publikasikan tidak akan menyimpang dari perbuatan yang di larang di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 UU ITE karena jikalau sudah terlanjur terpublikasikan maka dan dinyatakan menyimpang dari aturan tersebut dan ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum maka dampaknya harus dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abqa, Muhammad Abdi Razaq. *Peradilan & Penegakan Hukum*. Serang-Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: KENCANA, 2007.

Askin, H. Moh. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA, 2023.

Aziz, Ilham. *Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehiduoan Yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2024.

Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

Diantha, Made Pesek. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM JUSTIFIKASI TEORI HUKUM*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016.

Efendi, Jonaedi. *METODE PENELITIAN HUKUM: Normatif Dan Empiris*. Edisi Kedu. Jakarta: KENCANA, 2022.

Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalagunaan Narkoba Di Indonesia*. Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2022.

Jainah, Zainab Ompu, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, and Gusti Weliyansyah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 123–29.

Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis," 2025, 64-153.

Novianti, NLG., ING Sugiarta, and IGAAGP Dinar. "Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak

- Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2016): 1–23.
- Pamungkas, Ferdian dkk. “Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen.” *Vol. 6, No. 1* Vol. 6, No (2024).5
- Purbaya, Indra. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Judi Berkedok Investasi Binary Option Di Indonesia.” *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 2 (2024): 75–91. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i2.11330>.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Salle. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sembiring, Arjuna. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Prestisius Hukum Brilliance*. Vol. 6, 2024. <https://journalpedia.com/1/index.php/phb>.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, and Ramsul Yandi Nababan. “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online.” *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.
- Sriyana. “JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico” 7 (2025): 27–34.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Bangkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.